

Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Provinsi Sumatera Selatan

Mawaddah
Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
mawaddahwaromah0509@gmail.com

Sandrayati
Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
sandradewasaputra@gmail.com

Yevi Dwitayanti
Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

Article's History:

Received 5 Agustus 2023; Received in revised form 5 September 2023; Accepted 11 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Mawaddah., Sandrayati., & Dwitayanti, Y. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Provinsi Sumatera Selatan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5).2107-2122. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1548>

ABSTRACT

This study aims to analyze the determinants of government agency performance accountability in the OPD of South Sumatra Province. The sample in this study is devoted to only the Head of Service, the Head of the Finance Section and the Head of the Planning Section. The research data uses primary data. Research data obtained from distributing questionnaires. The number of samples is 75 respondents. The data analysis technique was multiple linear regression with the help of SPSS version 26 software. The results showed that: Implementation of Performance-Based Budgeting, Performance Reporting Systems and Government Internal Control Systems had a positive and significant impact on Government Agencies Performance Accountability.

Keywords : Accountability, Performance, Budget, Reporting, SPIP.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Provinsi Sumatera Selatan. Sampel pada penelitian ini dikhususkan hanya Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan. Data penelitian menggunakan data primer. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 75 responden. Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Anggaran, Pelaporan, SPIP.

Pendahuluan

Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat

AKIP). Kewajiban instansi melaksanakan AKIP tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, instruksi presiden tersebut menyatakan bahwa AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban secara periodik tersebut dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat LAKIP) sebagai instrument pelaksanaan AKIP.

Pelaksanaan AKIP saat ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan. Evaluasi tersebut sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sekarang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan evaluasi tersebut maka diperoleh hasil mengenai tingkat AKIP yang dikategorikan menjadi 7 tingkatan kategori yaitu AA (Sangat Memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C (kurang), dan D (sangat kurang).

Anggaran yang sudah dirancang dengan baik akan direalisasikan dengan baik juga. Namun rendahnya penyerapan anggaran Pemprov Sumsel menjadi indikasi buruknya kinerja OPD. Penyerapan anggaran Pemprov Sumsel menjadi salah satu sorotan Kemendagri dan Kemenkeu karena rendahnya penyerapan anggaran. Bony Balitong mengatakan serapan anggaran Pemprov Sumsel sebesar 58,2% per Nopember 2021 atau dalam waktu satu bulan hingga *crossing death* anggaran Pemprov Sumsel harus mencairkan 41,8% APBD Sumsel 2021, biasanya pada bulan Nopember anggaran belanja daerah sudah dicairkan untuk belanja tak langsung sebesar 90% dan ini artinya serapan belanja langsung pada Nopember paling tinggi mungkin pada kisaran 30%. Apa karena buruknya kinerja OPD terkait atau karena proyeksi anggaran yang terlalu tinggi sementara anggaran yang tersedia defisit (Sinerginkri.com, 2021).

Sistem pengendalian intern pemerintah yang lemah akan berakibat tidak tercapainya prinsip *good governance*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa permasalahan material dalam aspek perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan pengawasan atas pengelolaan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran. Kemudian aspek lelang, terdapat 38 paket pekerjaan pada Dinas PKP, Dinas PSDA dan Dinas PUBMTR yang berindikasi bahwa rincian HPS tidak bersifat rahasia, dan kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa serta pejabat pengadaan meloloskan calon penyedia yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan. Pada aspek pelaksanaan terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pada 67 paket pekerjaan. Selanjutnya dalam aspek pengawasan terdapat kelebihan perhitungan 15 paket pekerjaan jasa konsultasi pada Dinas PSDA, Dinas PKP, dan Dinas PUBMTR (BPK Sumsel).

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu anggaran berbasis kinerja. Melalui penerapan prinsip *good governance* yang sudah dilakukan oleh pemerintah, menuntut adanya reformasi dibidang manajemen keuangan daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah tersebut diperlukan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas guna mewujudkan pemerintah yang amanah dan profesional. Undang- Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Penerapan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan. Menurut Mardiasmo (2018), penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk

dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu anggaran berbasis kinerja organisasi berpedoman pada prinsip *value for money*.

Pelaksanaan AKIP juga perlu didukung oleh sistem pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 29 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas ini diwujudkan oleh pemerintah dalam suatu sistem pertanggungjawaban yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan renstra sampai dengan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP. LAKIP ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan APBD menjadi efektif, tanpa adanya belanja kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang baik serta menciptakan budaya kerja dari setiap SKPD yang berorientasi terhadap *customer satisfaction* atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 99) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

1.2.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 “anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai”. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja menjadi suatu cara dalam mewujudkan pencapaian kinerja dimana dalam sistem penganggaran sangat memperhitungkan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhitungkan efisiensi dalam mencapai kinerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori *stewardship* bahwa mekanisme penanggungjawaban dari organisasi yaitu dengan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin, secara tepat dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi (Tania dan Indrawati, 2021).

Jadi semakin baik penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai, maka semakin baik juga nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh. Sebaliknya, semakin buruk penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai, maka semakin buruk juga nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H1 : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan “Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD)”. Artinya, bahwa sesungguhnya setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah menyajikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Yudi, 2018).

Jadi semakin baik sistem pelaporan Kinerja, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Sebaliknya, semakin buruk sistem pelaporan Kinerja, maka semakin buruk pula akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa sistem pelaporan kinerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2 : Sistem Pelaporan Kinerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kinerja instansi pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur dan memberi sanksi atas tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi. Sistem pengendalian yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik (Welly, 2021).

Jadi semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Sebaliknya, semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin buruk pula akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Sistem Pelaporan Kinerja (X2). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 34 Organisasi Perangkat Daerah. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. Penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada seluruh pegawai yang menjadi sampel di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang akan dianalisis adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang telah diperoleh tersebut akan diolah menggunakan software SPSS versi 24 *for windows*.

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016: 19) "Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi)". Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Sugiyono (2019: 194) mengemukakan Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen dikatakan reliabel jika dinilai Cronbach Alpha $> 0,70$.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah- masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, maka data tersebut tidak menunjukkan adanya multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *spearman's rho*. Nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan uji 2 sisi, jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
X ₁	=	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
X ₂	=	Sistem Pelaporan Kinerja
X ₃	=	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
a	=	Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	=	Koefisien garis Regresi

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2016: 97) menjelaskan uji statistik t sebagai berikut membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Uji hipotesis menggunakan uji F yaitu untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang secara simultan (serentak) terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2016: 96) menjelaskan uji statistik f sebagai berikut membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan Sampel Jenuh yang ditujukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 34 OPD. Deskripsi data dimulai dengan gambaran objek penelitian dan karakteristik responden. Gambaran objek penelitian dimasukkan untuk memperoleh gambaran utuh tentang objek penelitian. Adapun karakteristik responden dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 102 kuesioner secara langsung pada Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Waktu penyebaran sampai dengan pengumpulan kuesioner berlangsung sejak bulan Mei sampai bulan Juli 2023 dan diperoleh 75 kuesioner dari 102 kuesioner yang disebarkan secara langsung sehingga data yang akan di olah sebanyak 75. Rincian data dalam penelitian ini berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima langsung dari masing-masing Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Pengumpulan Data

No	Nama Desa	Jumlah Kuesioner yang Disebar	Jumlah Kuesioner Yang Tidak Kembali	Jumlah Kuesioner Yang Diterima
1	Dinas Pendidikan	3	3	-
2	Dinas Kesehatan	3	-	3
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	3	-	3
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3	-	3
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	-	3
6	Dinas Sosial	3	-	3
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	-	3
9	Dinas Ketahanan Pangan Peternakan	3	-	3
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	3	-	3
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	-	3
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	-	3
13	Dinas Perhubungan	3	-	3
14	Dinas Kominfo	3	3	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	-	3
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	-
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	-	3
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	-	3
19	Dinas Perpustakaan	3	-	3

20	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	3	-
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	-	3
22	Dinas Perkebunan	3	-	3
23	Dinas Kehutanan	3	-	3
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	-	3
25	Dinas Perdagangan	3	-	3
26	Dinas Perindustrian	3	-	3
27	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	-	3
29	Badan Pendapatan Daerah	3	3	-
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	-	3
31	Badan Kepegawaian Daerah	3	-	3
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	-	3
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	-
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	-
Total		102	27	75
Persentase		100%	26,47%	73,53%

Karakteristik Responden

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin responden Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 34 orang dan wanita sebanyak 41 orang.

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan responden perangkat desa yang ada di 19 desa Kecamatan Rambutan menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan S3 tidak ada, S2 sebanyak 39 orang, S1 sebanyak 35 orang, D3 tidak ada, dan SMA sebanyak 1 orang.

Statistik Deskriptif**Tabel 2****Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	75	37	50	44.36	4.327
X1	75	70	95	83.91	8.056
X2	75	25	35	30.56	2.896
X3	75	40	55	48.63	4.730
Valid N (listwise)	75				

Jumlah sampel Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti adalah sebanyak 75 responden. Variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 37 nilai tertinggi (maximum) sebesar 50, nilai rata-rata (mean) sebesar 44,36, dan standar deviasi sebesar 4,327. Variabel independen penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 70, nilai tertinggi (maximum) sebesar 95, nilai rata-rata (mean) sebesar 83,91, dan standar deviasi sebesar 8,056. Dan variabel independen sistem pelaporan kinerja memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 25, nilai tertinggi (maximum) sebesar 35, nilai rata-rata (mean) sebesar 30,56, dan standar deviasi sebesar 2,896. Dan variabel independen sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 40, nilai tertinggi (maximum) sebesar 55, nilai rata-rata (mean) sebesar 48,63, dan standar deviasi sebesar 4,730.

Pengujian Kualitas Data

hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap sepuluh pernyataan yang digunakan dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Nilai r hitung untuk sepuluh pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel (0,227) sehingga keseluruhan sepuluh pernyataan dapat dikatakan valid. hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap Sembilan belas pernyataan yang digunakan dalam variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1). Nilai r hitung untuk sembilan belas pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel (0,227) sehingga keseluruhan sembilan belas pernyataan dapat dikatakan valid. hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap tujuh pernyataan yang digunakan dalam variabel system pelaporan kinerja (X2). Nilai r hitung untuk tujuh pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel (0,227) sehingga keseluruhan tujuh pernyataan dapat dikatakan valid. pengujian validitas yang dilakukan terhadap sebelas pernyataan yang digunakan dalam variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X3). Nilai r hitung untuk sebelas pernyataan instrumen secara masing-masing dapat dilihat dari kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Secara keseluruhan nilai r hitung > dari nilai r tabel (0,227) sehingga keseluruhan sebelas pernyataan dapat dikatakan valid.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal (Priyatno, 2012).

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		75
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21090197
a.	Most Extreme Differences	
	Absolute	.098
	Positive	.098
b.	Negative	-.076
c.	Test Statistic	.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) atau nilai *asymp.sig (2-tailed)* residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,070. Dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1).

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.200	1.629		-1.350	.181		
	X1	.141	.046	.262	3.094	.003	.153	6.518
	X2	.505	.079	.338	6.367	.000	.392	2.553
	X3	.397	.069	.434	5.772	.000	.195	5.125

Berdasarkan tabel di atas, nilai tolerance untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

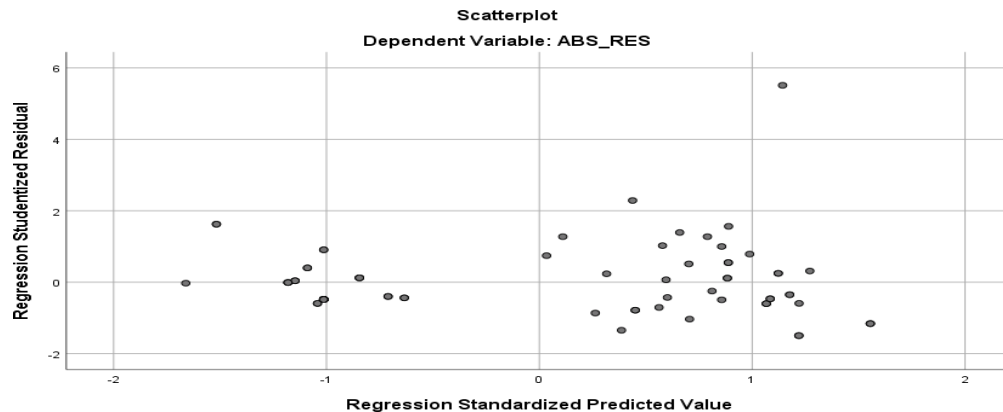
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. **Tabel 5**

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.200	1.629		-1.350	.181		
	X1	.141	.046	.262	3.094	.003	.153	6.518
	X2	.505	.079	.338	6.367	.000	.392	2.553
	X3	.397	.069	.434	5.772	.000	.195	5.125

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) variable penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadinya heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk menguji lebih lanjut mengenai heteroskedastisitas dapat dilihat gambar di bawah ini :



Dapat dilihat pada diagram di atas bahwa pencar yang ada tidak membentuk pola yang jelas atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Atau dengan kata lain *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar), maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode Analisis Regresi Linier Berganda ini digunakan untuk menguji hipotesis, serta untuk melihat kekuatan hubungan antara akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja sehingga hal ini perlu dilakukan pengujian penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2.200	1.629		-1.350	.181
	X1	.141	.046	.262	3.094	.003
	X2	.505	.079	.338	6.367	.000
	X3	.397	.069	.434	5.772	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji regresi linier berganda, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$= -2,200 + 0,141X_1 + 0,505X_2 + 0,397X_3 + e$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi variabel independen terdiri dari penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.960 ^a	.922	.918	1.236

Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square*. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,918 ini berarti 91,8% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen terdiri dari penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja. Sedangkansisnya (100% - 91,8% = 8,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel independen: penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan.

Tabel 8
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.200	1.629		-1.350	.181
	X1	.141	.046	.262	3.094	.003
	X2	.505	.079	.338	6.367	.000
	X3	.397	.069	.434	5.772	.000

a. Dependent Variable: Y

- a. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut : 1) Hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,994 (lihat pada tabel statistik). Karena t hitung > t tabel ($3,094 > 1,994$) dengan nilai signifikan sebesar 0,003 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau (sig) $0,003 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). 2) Hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,994 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung > t-tabel ($6,367 > 1,994$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau (sig) $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pelaporan kinerja (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Pada variabel independen (X₃) nilai t hitung sebesar 5,772.

Hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,994 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung > t-tabel ($5,772 > 1,994$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau (sig) $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X₃) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Uji F (Simultan)

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Dalam pengujian simultan variabel independen yaitu : penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja ditetapkan ketentuan bahwa jika F-hitung > F-tabel maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen (X1,X2,X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1276.775	3	425.592	278.485	.000 ^b

Residual	108.505	71	1.528		
Total	1385.280	74			

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 278,485 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa yakni F-hitung sebesar 278,485 lebih besar dari F-tabel 2,73, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen : penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t hitung untuk penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 3,094 jika dibandingkan dengan nilai t tabel adalah 1,994. Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis anggaran memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa H_01 ditolak atau H_{a1} diterima.

Hasil penelitian ini didukung Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 “anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai”. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja menjadi suatu cara dalam mewujudkan pencapaian kinerja dimana dalam sistem penganggaran sangat memperhitungkan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhitungkan efisiensi dalam mencapai kinerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori *stewardship* bahwa mekanisme penanggungjawaban dari organisasi yaitu dengan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin, secara tepat dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi (Tania dan Indrawati, 2021).

Pengaruh Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t hitung untuk sistem pelaporan kinerja adalah sebesar 6,367 jika dibandingkan dengan nilai t tabel adalah 1,994. Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pelaporan kinerja memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa H_02 ditolak atau H_{a2} diterima.

Hasil penelitian ini didukung Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan “Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD)”. Artinya, bahwa sesungguhnya setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah menyajikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Yudi, 2018).

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu Yudi Akhmad Sadeli (2018) menyatakan sistem pelaporan kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Jadi semakin baik sistem pelaporan Kinerja, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t hitung untuk sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar 5,772 jika dibandingkan dengan nilai t tabel adalah 1,994. Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa Ho3 ditolak atau Ha3 diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kinerja instansi pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur dan memberi sanksi atas tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi. Sistem pengendalian yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik (Welly, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Welly (2021) menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, artinya Jadi semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 2) Sistem pelaporan kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 3) Penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan kinerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 4). Penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Evaranus. 2020. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Abdul Halim , Muhammad Syam Kusufi. 2016, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
- Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuad, M., Edy, S dkk. 2020. Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Putra. 2017. Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *Skripsi*. Program Magister Akuntansi Universitas Mataram
- Sasongko dan Parulian. 2018. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Tania dan Indrawati. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Wahyuni, S. 2019. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (studi kasus desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Medan.
- Welly. 2021. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
- Yudi. 2018. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Makassar. *Skripsi*. STIEM Bongaya Makassar